

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perubahan cara pandang atau paradigma pemikiran, sekarang ini sedang berlangsung dari pilihan rasional (*rational choice*) kepada logika komunikatif (*communicative rationality*). Proses perubahan tersebut juga menuntut pengaturan penyelenggaraan berbagai kegiatan secara kolaborasi (Akerlof dan Shiller, 2009; Roling dan Jiggins, 2007; Pauker, 2006). Konsekwensinya berbagai aktivitas yang dikerjakan dengan pendekatan *ego-sektoral*, perlu melakukan transformasi menjadi kegiatan yang lebih menyeluruh pendekatannya.

Sejumlah bidang telah mengalami pendekatan kolaborasi dalam interaksi para pemangku kepentingannya, pelatihan kolaboratif dalam penyuluhan pertanian masih perlu penggalan bukti dari lapangan (Charlies dkk. 2016; Evers, dkk 2016; Berliner dkk, 2014; Hill, dkk 2013). Pelatihan dalam penyuluhan pertanian dan pembangunan merupakan pendidikan jangka pendek dan tidak formal. Tujuannya untuk memperbaiki kompetensi sumberdaya manusia, terutama, sesudah melewati priode usia pendidikan formal.

Kompetensi sumberdaya manusia (SDM) peternak penting untuk upaya akselarasi pembangunan pertanian dan peternakan. Baik dari sisi pandang perubahan lingkungan strategis, bioteknologi maupun kondisi objektif lapangan di Indonesia. Meski proses pengembangan mutu SDM perlu waktu, upaya mempercepat perbaikan kualitas mendesak dilakukan. Stolovitch dan Keeps (1992) menyatakan bahwa kendati inovasi mekanis dan bioteknologi penting, kinerjanya tergantung kepada fungsi kompetensi sumberdaya manusia. Craig (1996) juga mengukuhkan bahwa esensi mutu sumberdaya manusia melalui pelatihan adalah faktor penentu perkembangan kelompok di tengah perubahan kondisi lingkungan, inovasi bioteknologi, kompetisi ekonomi, dan perbedaan budaya serta watak setiap kegiatan.

Di Indonesia, Soemardjo (2015: komunikasi pribadi) – selaku ketua komisi penyuluhan pertanian – menggarisbawahi implikasi makna kompetensi

SDM yang merupakan jaban dari amanat pembukaan undang undang dasar negara dalam kerangka berfikir mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada posisi ini, aktivitas penyuluhan dan pelatihan merupakan metode untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, selain pendidikan formal. Uniknya, jenjang pendidikan formal hanya menerpa sebagian kecil dari masyarakat, khususnya yang berusia sekolah. Padahal, bagian terbesar dari masyarakat justru membutuhkan upaya pengembangan kompetensi mereka secara berkelanjutan. Jadi, peran dan kiprah pelatihan menjadi amat esensial dan perlu mendapat perhatian serius.

Salah satu bentuknya adalah pelatihan kolaboratif untuk perbaikan kompetensi peternak sapi di Kabupaten Pasaman Barat. Berbeda dengan pola pelatihan konvensional, esensi kolaborasi ialah sejumlah pihak berkepentingan mengelola pelatihan secara bersama sama. Seperti sajian dari Zdravkovic (2014; mengutip Kezar, 2005 dan Gray 1989) kolaborasi merupakan buah kerjasama sukarela;

“Collaboration can be defined as ‘a process in which a group of autonomous stakeholders of an issue domain engage in an interactive process, using shared rules, norms, and structures to act or decide on issues related to that domain’ (Kezar2005). Gray (1989) argues that collaboration involves problem setting, direction setting, and implementation. The motives for joining a collaboration are numerous ranging from sharing facilities, external pressures, resource scarcity, technology demands, and also personal networks, and state mandates (Zdravkovic, 2014:20)”.

“Kolaborasi dimengerti sebagai suatu proses dimana sekelompok pihak terkait yang independen terhadap satu masalah bertekad terlibat dalam proses interaktif, berbagi nilai, norma, dan struktur untuk bertindak atau memutuskan suatu masalah terkait. Kolaborasi melibatkan pemahaman masalah, tujuan dan aksi penerapan. Motif bergabung dalam sebuah kolaborasi beragam, mulai dari berbagi fasilitas, tekanan dari luar, kelangkaan sumberdaya, tuntutan teknologi, dan jaringan kerja perorangan atau amanat Negara (Zdravkovic, 2014:20)”.

Dengan demikian pelatihan – sebagai pendidikan tidak formal jangka pendek yang berorientasi perbaikan kompetensi teknis – diselenggarakan secara kolaborasi, merupakan kegiatan pembelajaran secara bersama sama dari para pihak pemangku kepentingan.

Adapun pengaruh perubahan cepat dari lingkungan strategis, sedikitnya meliputi dua hal. Pertama, desentralisasi pengambilan kebijakan pemerintahan dan pembangunan (pertanian). Misalnya, perhatikan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24. Kemudian, Undang Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58.

Kedua, liberalisasi peran dan pelaku penyuluhan dari monopoli Negara, yang kini berbagi fungsi dengan swasta dan lembaga masyarakat. Penguatan Undang Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan satu teladan. Aturan ini mengakui bahwa pelaku penyuluhan pembangunan pertanian menjadi tiga; pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pemda (ASN – aparatur sipil negara). Di Sumatera Barat undang undang nomor 16 tahun 2006 telah dijabarkan menjadi dasar penumbuhan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Bakorluh) Sumbar melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga lain.

Desentralisasi kebijakan dan liberalisasi pelaku penyuluhan pertanian meminta ketiga lembaga untuk berkolaborasi menjalankan fungsinya. Suatu hal baru yang selama ini justru kerap berjalan sendiri sendiri. Teori interaksi intersystem dan budaya lembaga dipakai di sini. Tetapi kajian yang kerap memotret perselisihan atau sengketa antara sistem, perlu di re-orientasi menuju arah baru, yaitu; kolaborasi. Pertimbangan untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan pertanian yang sesuai dengan kondisi daerah; baik aspek fisik lingkungan maupun sosial budaya (Anderson dan Hoff, 1993) menambah urgensi kolaborasi. Dengan demikian, baik desentralisasi, liberalisasi, atau akomodasi potensi dan kebutuhan daerah membutuhkan kompetensi SDM petani peternak yang kreatif dan tepat guna. Oleh karena itu, perbaikan mutu SDM perlu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan secara kolaboratif.

Lebih dari itu, kolaborasi merupakan opsi, tidak saja pada tingkat global, tetapi juga pada tataran nasional maupun lokal. Berliner dkk (2014) mengusung tema kolaborasi dan kemitraan untuk pembangunan global. Melalui *Global Knowledge Initiative* berbagai lembaga lintas negara bermitra sebagai pilihan jitu mengatasi aneka tantangan pembangunan. Lembaga dari negara maju dan berkembang melakukan kolaborasi riset bagi proses pembelajaran, alih teknologi dan perbaikan kapasitas SDM (Krattiger, 2007). Horton, Prain dan Thiele (2009) menulis bahwa bekerja dalam kerangka kemitraan merupakan kebiasaan baru di tengah lembaga dunia untuk mengatasi masalah ekonomi, lingkungan, sosial dan teknologi. Model kolaborasi ini juga menjadi arus utama dan kepedulian lembaga riset pembangunan pertanian. Penelusuran pustaka dari Pant (2009) menguraikan, meski bacaan manajemen ilmu pengetahuan untuk pembangunan terbatas, jejaring kerja berbagai lembaga untuk pembelajaran, merupakan inti perbaikan kapasitas lembaga.

Kemudian, kolaborasi untuk suatu inovasi, mengakui adanya interaksi pihak terkait sesuai kondisi belajar tingkat lokal. Hill dkk (2013) menegaskan bahwa kolaborasi beragam pihak merupakan peluang memperdalam pengetahuan teori pembelajaran orang dewasa, terutama sistem pelatihan pertanian di negara berkembang. Pant (2009) menekankan pentingnya kolaborasi ditengah kondisi belajar yang khas dari satu daerah. Kolaborasi ini membutuhkan dukungan dari fasilitas lingkungan yang memungkinkan, khususnya tentang kebijakan dan infrastruktur proses pembelajaran inovatif.

Di Indonesia, Chaidirsyah (2013) menyebutkan peluang pemberdayaan peternak semakin terbuka melalui desentralisasi penyuluhan. Suatu kesempatan yang melibatkan daya tarik pasar dan perbaikan kapasitas SDM, yang membuat peternak memiliki opsi. Peternak bisa menggunakan kelompok, asosiasi dan atau pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Kecendrungan ini membutuhkan kapasitas penyuluh dan SDM peternak berbeda, yang pada gilirannya menuntut proses pengisian kesenjangan kompetensi yang terjadi. Dengan demikian, perbaikan mutu SDM penyuluh dan peternak adalah kegiatan yang mendesak.

Kendati dampak mekanisme pasar merugikan peternak (Röling dan Jiggins 2007), Akerlof (2001: 2009) mengingatkan bahwa para pengambil

kebijakan perlu paradigma menyeluruh untuk keluar dari watak ‘*animal spirit/nafsu binatang*’;

“If there is any subject in economics which should be behavioral, it is macroeconomics. I have argued in this lecture that reciprocity, fairness, identity, money illusion, loss aversion, herding, and procrastination help explain the significant departures of real-world economies from the competitive, general-equilibrium model. The implication, to my mind, is that macroeconomics must be based on such behavioral considerations”.

“Jika ada sesuatu subjek kajian dalam ekonomi yang mesti sesuai dengan perilaku, itulah ekonomi makro. Saya berhujah dalam kuliah ini, bahwa saling memberi dan menerima (bertukar) yang sepadan, keadilan, identitas, khayalan uang, dan habisnya dendam kesumat, pengawasan, serta penundaan menandai perubahan nyata ekonomi dari kompetisi dan model kesetimbangan. Implikasinya adalah, bahwa ekonomi makro mesti disandarkan kepada pertimbangan tindak perilaku. (8 Desember 2001 pada pidato anugerah hadiah Nobel)”.

Mengutip pendapat Peuker, (2006: 2); pola ekonomi pasar dengan paradigma ‘*rational choice*’ mendatangkan banyak persoalan. Oleh karena itu, perlu mutu SDM dengan kompetensi yang lebih komprehensif.

“At present many scientists both within and outside of economics find the universal application of rational choice models to real economic and social processes problematic (Blaug 2001, Hausman 2003, Sen 2002). They refer mainly to the inability of rational choice models to sufficiently describe real problems, such as the ecological problem and allocation problems, both on the basis of its assumptions and regarding the possibility of implementation of the resulting political measures (Blaug 2001, Sen 2002)”.

“Kini, sejumlah ilmuwan baik dari ahli ekonomi atau bukan, menemukan bahwa penerapan model *rational choice* / pilihan rasional, pada realita kehidupan ekonomi dan sosial menimbulkan masalah (Blaug 2001, Hausman 2003, Sen 2002). Mereka merujuk pada ketidakmampuan model ‘pilihan rasional’ menggambarkan persoalan nyata secara memadai, malah justru mendatangkan masalah ekologis dan alokasi sumberdaya, sesuai dengan asumsi dan kemungkinan penerapannya yang mendorong gesekan politik (Blaug 2001, Sen 2002)”.

Mulyani (2010) dengan pendekatan sistem kajian pertanian nasional, juga mendorong perbaikan kapasitas penyuluh melalui sinergi lembaga terkait. Secara khusus, koordinasi antar lembaga, kapasitas pelaku dan kebutuhan lokal

peternak menjadi pertimbangan utama. Sekali lagi, pelatihan peningkatan SDM menjadi penting dilakukan.

Sebaliknya Muthoo, Danielson dan White (2014) dalam laporan IFAD tentang Indonesia menyatakan bahwa pengalaman dari tahun 2004 sampai 2012 membina kemitraan dan jejaring pengetahuan, tapi hasilnya, tidak sampai menjadi kebijakan. Kerjasama para pihak terkait tidak memadai dan tidak berjalan sesuai harapan. IFAD merekomendasikan untuk merubah cara pandang agar lebih fokus kepada perbaikan kapasitas inovasi melalui kegiatan diluar pinjaman dana. Intinya, kompetensi SDM yang berakumulasi kepada kinerja lembaga dalam kemitraan menjadi opsi penting untuk diperbaiki.

Di Sumatera Barat, kondisi objektif telah mengalami sejumlah perubahan. Pertama, cara pandang yang terpadu dalam pembangunan pertanian melalui gagasan gerakan pensejahteraan petani (GPP) dan satu petani satu sapi (SPSS) semenjak tahun 2010. Paradigma terpadu melihat aktivitas petani peternak tidak dari satu komoditi, melainkan terintegrasi dari semua kehidupan dalam kawasan. Kegiatan pertanian saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain yang membutuhkan SDM lebih komplit. Misalnya petani kelapa sawit Pasaman Barat yang mengenalkan ternak sapi untuk meraih efisiensi usaha dan meningkatkan keberdayaan. Pendekatan terpadu cocok dengan pemikiran teori pembangunan pedesaan tahun 2000an (Ellis dan Biggs 2001), yang mengagendakan arah kepada *sustainable livelihoods, good governance, decentralization, social protection, poverty eradication dan sector-wide approach*. Jadi, arah paradigma pembangunan pertanian ialah keberlanjutan dengan upaya 'leisa' (*low external input and sustainable agriculture*) yang intinya berada dalam ranah '*communicative rationality*'.

Kedua, kebijakan pembangunan jangka panjang Sumatera Barat 2005-2025 telah sampai pada pengenalan teknologi pengolahan untuk meraih nilai tambah. Kondisi yang berbasis pada '*knowledge based economy*' dengan pola '*techno-park*' membutuhkan SDM kompeten melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kawasan (sentra produksi, *agropolitan, cluster*, sumber bibit dan kampung rendang) merupakan teladan. Semua pendekatan di atas meminta kreatifitas, yang meliputi bioteknologi, seperti; merubah air mani (sperma) sapi

sampai kepada teknologi rendang. Intinya ada nilai tambah yang dinikmati pelaku dari dalam daerah pada tiap tahap dari rantai usaha.

Ketiga, posisi Sumatera Barat sebagai lokasi pelatihan bioteknologi ternak sapi lintas Negara Asia Tenggara. Hal ini merupakan konsensus poin 8.7 article 31 mengenai *Agreed meeting the 2nd of IMT-GT working group on agriculture, agro-based industry and environment (WGAAE)* di Phuket Thailand 30-31 May 2008. Pelatihan yang bertaraf dan bermutu internasional mesti dimulai dengan ‘pengalaman mengelola’ pelatihan itu sendiri. Apalagi watak pertanian yang amat tergantung pada kekhususan lokasi (Anderson dan Hoff; 1993) semakin membutuhkan mutu SDM pertanian kompeten.

Keempat, kemitraan inti dan plasma kebun sawit serta keterpaduan dengan ternak sapi membutuhkan fasilitasi pengembangan SDM. Kondisi petani terpadu mitra belum berdaya lantaran masuk kedalam dilema ‘*price taker*’ saat transaksi penjualan. Tambunan (2014) menyarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan inisiatif perbaikan kapasitas kemitraan bidang pertanian melalui bantuan teknis, pelatihan dan akses kredit.

“in light of common problems found in many existing business partnership in the agricultural sector, the government ought to consider enhancing its capacity building initiatives (e.g. training, tehcnical assistance, access to credit, and soon) to empower further local farmers involved in such business partnerships”.

“Dalam tatapan persoalan umum yang ditemukan pada banyak kemitraan bisnis disektor pertanian, pemerintah semestinya mempertimbangkan upaya perbaikan kapasitas dalam hal membangun inisiatif (seperti; *pelatihan*, bantuan teknis, akses kepada kredit, dll) untuk seterusnya memberdayakan petani dan peternak lokal dalam kemitraan usaha semacam itu (Tambunan; 2014. hal 127)”.

Dengan demikian, *knowledge based economy, techno-park*, kawasan perbibitan, kampung rendang, integrasi sapi sawit dan pusat pelatihan biotechnology sapi untuk IMT-GT, menandai priode keunggulan kompetitif pembangunan pertanian. Akibatnya pembangunan pertanian mengalami perubahan dari konotasi keunggulan komparatif selama ini. Dengan demikian, pola agribisnis terpadu menjadi esensi dalam pembangunan pertanian.

Liem Siok Lan (2008:121-122) melihat transformasi dari perbedaan antara keunggulan komparatif/ *comparative advantage* dengan keunggulan kompetitif/ *competitive advantage*. Keunggulan komparatif mengakui adanya keterbelakangan sebagai gejala ekonomi. Sehingga keunggulan sumberdaya alam dan upah buruh murah menjadi ukuran. Khususnya dalam membandingkan dengan daerah dan atau negara lain. Sebaliknya, keunggulan kompetitif menempatkan bioteknologi dan pembangunan mutu sumberdaya insani sebagai indikator. Keduanya berpadu menjadi aspek kultural (perubahan sikap mental dari terjajah menjadi rasional dan merdeka) dan struktural (keterbukaan akses sumberdaya dan transparansi kebijakan menuju kemandirian).

Upaya berkesinambungan meraih keuntungan kompetitif melalui tiga hal; keuangan, produk atau pasar dan sumberdaya manusia (Salas, dkk; 2012). Era globalisasi, pasar bebas ASEAN dan teknologi komunikasi menempatkan keuangan, produk dan pasar sebagai ranah yang semakin mengerucut kepada kesamaan dibading perbedaan. Pada posisi ini, membina dan mempertahankan sumberdaya manusia yang berkarakter menjadi opsi terbaik bagi kelangsungan ekonomi kompetitif.

Oleh karena itu, perubahan kondisi objektif daerah dalam pembangunan pertanian Sumatera Barat, konteks nasional Indonesia dan tataran lingkungan strategis internasional, bermuara kepada satu arah, yaitu perbaikan kapasitas SDM peternak agar lebih mandiri dan berkelanjutan. Secara praktis, perbaikan mutu SDM peternak akomodatif terhadap tantangan, supaya mampu mencapai keluarga yang lebih sejahtera. Dari alasan alasan diatas, dilakukan satu kajian bagi penyusunan disertasi dengan judul, pelatihan kolaboratif untuk perbaikan kompetensi peternak sapi di Kabupaten Pasaman Barat.

Kolaborasi menjadi pilihan lantaran liberalisasi pelaku penyuluhan (UU nomor 16 tahun 2006 dan UU nomor 9 tahun 2015 pemerintah daerah) dan tuntutan kebutuhan lokal pembangunan pertanian (Anderson dan Hoff, 1993; Muthoo, Danielson dan White; 2014). Kolaborasi merupakan rekonstruksi bersama atas kerjasama positif bidang peternakan antar pihak terkait untuk perbaikan keberdayaan dan pada gilirannya bagi kesejahteraan peternak.

Secara teknis, kolaborasi membuka ruang ‘kontak’ antara wakil para pihak. Kontak membina jaringan kerja, yang akan membuka dan menyediakan peluang, setelah melalui pengujian terhadap kepercayaan antara pribadi yang punya kontak. Jaringan kerja yang terbina mengalirkan ‘berbagi pengalaman dan keterampilan’. Akhirnya proses kolaborasi ini menjadi ranah pembelajaran untuk perbaikan kompetensi peternak. Jadi kolaborasi adalah sebetulnya usaha ‘berjamaah untuk kebaikan’.

B. Rumusan Masalah

Tingginya intervensi pasar (Bank Dunia, 2006) dalam sistem inovasi pertanian yang acapkali merugikan peternak (Roling dan Jiggins 2007), membutuhkan lembaga yang bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan bioteknologi untuk proses transformasi ekonomi dan posisi sosial. Miller (2006) menegaskan, transformasi berlangsung melalui proses belajar sosial yang konstruktif (Korten, 1980; Chambers 2007) dan kajiannya menghasilkan teori lokal. Dengan kata lain efektifitas diseminasi inovasi membutuhkan kehadiran institusi yang saling menguatkan (Juma, 2005; 2011) dan dukungan kompetensi sumberdaya manusia yang tepat.

Liberalisasi pelaku diseminasi inovasi (UU nomor 16/2006) membuka ruang bagi partisipasi tiga institusi yang berbeda wataknya (Chaidirsyah, 2013). Kecendrungan untuk berkolaborasi menjadi opsi terbaik mengatasi kondisi terpadu yang petani peternak hadapi (Berliner dkk, 2014; Hill, 2013; Mulyani, 2010; Horton dkk, 2009; Pant, 2009; Krattiger, 2007). Celakanya, secara empiris, interaksi sengketa antara lembaga justru menarik dibandingkan dengan sinergi dan kolaborasi (Rosendal 2000, 2001; Andersen 2002; Chambers 1998, 2001; Oberthier 2001; Stokke 2001b). Aktivitas berkolaborasi justru banyak terjadi dalam bidang pendidikan kesehatan (Misener dan Valaitis, 2009) dan lingkungan (Charlies dkk. 2016; Evers, dkk 2016, sedang pengembangan kompetensi sumberdaya peternak belum dikaji.

Kolaborasi menggunakan teori *intersystem* dan budaya organisasi, seperti disebut oleh Tattenham (2009). Intersistem melibatkan interaksi (konflik atau konsensus) dari dua atau lebih sistem. Sistem itu sendiri ialah

pandangan satu entitas terhadap lingkungan yang membuatnya berbeda dengan entitas lain'. Pada satu system organisasi yang berkolaborasi, perilaku lembaganya berfungsi mencapai tujuan bersama. Untuk berkolaborasi, para pihak mesti mengantisipasi kelemahan dukungan birokrasi, budaya yang berbeda dan tiadanya petunjuk pelaksanaan. Solusinya ialah kebijakan mengelola kegiatan secara kolaboratif dengan memperbaiki tingkat kinerja profesional para pelaku.

Berbeda dengan konvensional, pelatihan kolaboratif menjalin kemitraan antar institusi yang dipengaruhi oleh proses interaksi sebelumnya. Pemikiran dan perilaku interaksi yang berbasis motif ekonomi, dilebarkan menjadi capaian kepuasan dalam memberikan manfaat bagi semua pihak. Oberthier dan Gehring (2006) mengungkapkan bahwa kajian wacana kolaborasi semakin menarik dengan fokus penilaian efektifitas institusi (Young dkk.1999; Young 2002; Underdal, 2004; Stokke 2001a).

Secara umum ada tiga kategori lembaga yang berkolaborasi, yaitu; (a) institusi pelayanan umum, (b) pihak usaha swasta dan (c) kelompok peternak. Sesuai dengan fungsinya, ketiga tipe lembaga meliputi peran; (1) institusi pembuat kebijakan untuk suasana yang kondusif (*enabling setter*), (2) institusi pelayanan (*delivery server*) dan (3) institusi penerima manfaat (*beneficiary*). Inilah tantangan bagi peternak sapi Bali di Pasaman Barat yang perlu kompetensi untuk mewujudkan kawasan sumber bibit.

Model pelatihan kolaboratif bisa menjawab kesenjangan kompetensi peternak yang memusat pada teori *intersystem* dan budaya lembaga. Kolaborasi merupakan kebaruan dalam pelatihan dan pembangunan pertanian, lantaran *intersystem* selama ini lebih banyak membahas sengketa. Kalaupun, kolaborasi sudah ada yang mengkaji, justru lebih banyak bidang pendidikan kesehatan.

Kehadiran kawasan sumber bibit bagi peternak sapi pada tiga kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat merupakan transformasi usaha dari 'budidaya kepada pembibitan'. Pertama, meski tetap berada di ranah penguatan budidaya, inovasi '*recording*' (mengukur, menimbang dan mencatat untuk menseleksi), adalah upaya meraih nilai tambah usaha. Kedua, walau kawasan ini telah mandiri secara agribisnis sapi potong, tapi diversifikasi peran aneka

lembaga yang peduli pada perbaikan kompetensi peternak membutuhkan pelatihan. Ketiga, perlunya kesadaran kolektif untuk mengatasi cengkraman struktur sosial ekonomi petani dan peternak yang bertipe *'price taker'*. Jadi secara teknis, masalah penelitian berangkat dari kebutuhan untuk diseminasi inovasi *recording* dengan penguatan budidaya ternak dan dukungan institusi yang tepat melalui kolaborasi manajemen dan substansi pelatihan.

Ketika kompetensi peternak yang tepat dibutuhkan, pertanyaannya ialah; bagaimana rekonstruksi pelatihan kolaboratif untuk memperbaiki kompetensi peternak ditengah liberalisasi pelaku penyuluhan dan perbedaan potensi, kepentingan, arah serta kebutuhan kawasan. Dengan begitu, rumusan masalah ialah cara memperbaiki kompetensi peternak sapi dengan lebih tepat, melalui;

1. Bagaimana proses penyelenggaraan pelatihan kolaboratif untuk perbaikan kompetensi peternak sapi dari sisi rencana, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Bagaimana pelatihan kolaboratif dapat menjelaskan perbaikan kompetensi peternak sapi.

C. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan di atas, dirumuskan tujuan penelitian, melalui dua hal, yaitu;

1. Mendeskripsikan proses pelatihan kolaboratif untuk perbaikan kompetensi teknis peternak sapi dari segi rencana, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Menjelaskan bagaimana pelatihan kolaboratif dapat memperbaiki tingkat kompetensi peternak sapi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan masukan untuk kebijakan. Pertama, kolaborasi menjadi kebaruan dalam kajian pengembangan sumberdaya peternak. Sebab, pendekatan pelatihan konvensional dan menjadi tanggungjawab satu instansi, kini menjadi

kolaborasi sinergis dari berbagai lembaga. Konsekwensinya pelatihan kolaboratif – dengan berbagi keunggulan, fasilitas dan pengalaman – lebih tepat meningkatkan kompetensi dan lebih cepat mengisi kesenjangan kapasitas peternak. Bila pengalaman kolaborasi telah banyak pada pendidikan kesehatan untuk pelayanan manusia, kini pelatihan peternak bagi pelayanan ternak.

Kedua, perluasan dan kombinasi target aktivitas sebagai ukuran sukses kegiatan. Untuk pribadi meliputi kognitif, afektif dan psikomotor yang disimak dari akumulasi kinerja. Untuk lembaga pemerintah dengan kebijakan bisnis sosial dalam rancang bangun ekonomi konstitusi dan bagi perusahaan melalui CSR yang membatasi margin keuntungan. Hasil kolaborasi ini membuka ranah yang memadai dan kompetensi yang tepat dalam penyuluhan dan pembangunan peternakan.

E. Ruang lingkup Penelitian

Rekonstruksi penelitian mencakup dua aspek; (a) mendeskripsikan rencana, proses dan evaluasi pelatihan kolaboratif, (b) menganalisis perbaikan kompetensi peternak. Kompetensi mentransformasikan tujuan beternak dari ‘budidaya’ kepada ‘pembibitan’ agar kawasan ‘sumber bibit’ ternak sapi terwujud. Penelitian sejalan dengan program penguatan perbibitan ternak pada kabupaten terpilih Pasaman Barat, yang merupakan satu dari enam daerah serupa di Indonesia.

Ruang lingkup penelitian meliputi hal, seperti; menggambarkan kolaborasi merencanakan (sumberdaya dan materi pelatihan), melaksanakan (dukungan pihak terkait dan fasilitas terselenggaranya pelatihan) dan evaluasi (*output* dan *outcome* pelatihan kolaboratif) serta menjelaskan upaya perbaikan kompetensi peternak sapi.

F. Kebaruan Penelitian

Tiga hal menjadi kebaruan dalam penelitian ini, adalah;

1. Kolaborasi itu sendiri merupakan kebaruan dalam kajian inter-sistem yang berorientasi pada konsensus. Khususnya kolaborasi pelatihan yang memfasilitasi perbaikan kompetensi sumberdaya manusia (peternak)

dalam hubungan dengan hewan ternak. Oleh karena, kolaborasi yang sudah terjadi selama ini lebih banyak dalam bidang pendidikan kesehatan yang memfasilitasi pelayanan kepada manusia.

2. Sumbangan dari pengalaman berkolaborasi dalam penyelenggaraan aktivitas pelatihan adalah, perbaikan kompetensi sumberdaya manusia (peternak) mesti lebih memperhatikan kinerja. Konsekwensinya, ukuran kompetensi perlu disimak dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Hal ini merupakan re-orientasi dari penyelenggaraan pelatihan yang cenderung mengejar kelengkapan administrasi dan kurang peduli dengan kegiatan tindak lanjut sesudah pelaksanaan pelatihan.
3. Orientasi kinerja dari pelatihan kolaboratif yang mengusung keunggulan setiap pemangku kepentingan menjadi kontribusi esensial terhadap proses transformasi penyuluhan pembangunan pertanian. Setiap pihak terkait memberikan sumberdaya untuk perbaikan kompetensi, efektifitas dan produktifitas proses penyuluhan pembangunan itu sendiri.

